

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN DAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU

Emi Alimus

*Jurusan Akuntansi Audit Internal, Universitas Muhammadiyah (UM) Palopo
emhyalimus@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi persediaan dan akuntansi aset tetap dengan standar yang berlaku, yang diterapkan pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Luwu. Akuntansi persediaan yang dimaksud meliputi Klasifikasi persediaan, pengukuran persediaan, dan pengungkapan persediaan. Sementara akuntansi aset tetap yang dimaksud meliputi klasifikasi, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap. Standar yang berlaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang akuntansi persediaan dan Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi persediaan dan akuntansi aset tetap Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Luwu sebagian besar sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun perlakuan akuntansi yang belum sesuai, diantaranya: kesalahan pengakuan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan, dan tidak mengungkapkan masa manfaat aset tetap dan tarif penyusutan aset tetap.

Kata Kunci :Akuntansi Persediaan, Akuntansi Aset Tetap

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the application of inventory accounting and accounting for fixed assets with applicable standards, which are applied to the Regional Financial Management Agency of Luwu Regency. Inventory accounting in question includes the classification of inventories, inventory measurement, and inventory disclosure. While accounting for fixed assets in question includes the classification, measurement and disclosure of fixed assets. The applicable standard referred to in this research is the Accrual Based Government Accounting Standards Number 05 concerning inventory accounting and Number 07 regarding accounting for fixed assets, as stated in Government Regulation Number 71 of 2010. Data analysis was performed using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that accounting for inventories and fixed assets accounting for the Regional Financial Management Agency of Luwu Regency are mostly in accordance with applicable standards. As for accounting treatment that has not been appropriate, including: errors in recognizing fixed assets in the form of construction in progress, and not disclosing the useful life of fixed assets and depreciation rates for fixed assets.

Keywords: Inventory Accounting, Fixed Asset Accounting

PENDAHULUAN

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut. Oleh karena itu sistem akuntansi menjadi tuntutan sekaligus kebutuhan bagi setiap pemerintah daerah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal. Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data,

pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Kayati 2016).

Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi. (Zuliarti, 2014)

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 adalah SAP yang mengakui pendapatan-LO dan beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD, yaitu basis kas.

Adanya penetapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan hal iniditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Putra, 2015). Berdasarkan uraian diatas maka dapat diangkat permasalahan dalam penelitian berjudul : Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Dan Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.

Rumusan Masalah

Dari hal tersebut dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana klasifikasi, pengukuran, dan pengungkapan dalam penerapan akuntansi persediaan dan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Luwu?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian klasifikasi, pengukuran, dan pengungkapan dalam penerapan akuntansi persediaan dan akuntansi aset tetap dengan standar yang berlaku, yang telah diterapkan pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.

TINJAUAN PUSTAKA

Defenisi Akuntansi

Akuntansi menurut American Accountion (1966) seperti yang dikutip Abdul Halim dan Muhammad Syam kusufi (2014), akuntansi adalah suatu proses pengedintifikasiaan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Pada kerangka konseptual Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa: Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan atau yang digunakan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 aset terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset nonlancar.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pospos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar merupakan aset pemerintah yang penggunaannya diharapkan melebihi satu periode pelaporan (1 tahun), terdiri dari aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah maupun yang digunakan oleh masyarakat umum. Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) aset nonlancar terdiri dari aset tetap, dan aset lainnya.

Akuntansi persediaan

Definisi persediaan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (PSAP BA) No. 5 Paragraf 4 PP No. 71 Tahun 2010 adalah Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pada PSAP BA No. 05 Paragraf 4 PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Termasuk dalam kelompok ini adalah barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh persediaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat-alat pertanian setengah jadi.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contohnya adalah hewan/tanaman.

Akuntansi Aset Tetap

Definisi aset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (PSAP BA) No. 7 Paragraf 4 PP No. 71 Tahun 2010 adalah: Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Berdasarkan PSAP BA No. 7 Paragraf 7-14 PP No. 71 Tahun 2010, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2014:147). Dalam penelitian ini data sekunder yang diperlukan antara lain gambaran umum mengenai Badan Pengelolah Keuangan Daerah tersebut, serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data yang mendukung penelitian ini, seperti bukti transaksi, jurnal, hingga laporan keuangan Badan Pengelolah Keuangan daerah Kabupaten Luwu serta dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini.

Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif komparatif yaitu dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian mengolah, menganalisis, selanjutnya menginterpretasikan penerapan akuntansi persediaan dan akuntansi aset tetap Badan Pengelolah Keuangan Daerah dengan standar yang berlaku. Sehingga dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang akuntansi persediaan dan akuntansi aset tetap SKPD di Kabupaten Luwu (Studi empiri pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Luwu).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi Persediaan BPKD Kabupaten Luwu

Persediaan kantor BPKD Kabupaten Luwu terdiri atas bahan habis pakai, bahan material, dan barang yang diserahkan kepada masyarakat. Seperti yang dijelaskan pada PSAP BA 05 paragraf 9 PP No. 71 tahun 2010, persediaan dapat berupa barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, persediaan untuk jaga-jaga, pita cukai/leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, barang yang disediakan untuk diserahkan kemasyarakat, dan hewan/tumbuhan. Maka dapat disimpulkan bahwa klasifikasi persediaan yang dicatat oleh kantor BPKD kabupaten luwu telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.(sumber: CALK kantor BPKD kabupaten Luwu) Persediaan pemerintah kabupaten Luwu per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp9.732.893.930,38 yang terdiri atas :

- a. Persediaan bahan habis pakai berupa ATK sebesar Rp 42.251.900,00 dan alat kebersihan sebesar Rp 4.741.100,00
- b. Bahan material berupa obat-obatan sebesar Rp 5.026.814.051,20; bahan makanan pokok sebesar Rp 381.939.325,00; bibit tanaman sebesar Rp 19.600.000,00; bibit ikan sebesar Rp 21.345.000,00; Alat Pertanian sebesar Rp 7.675.000,00; Alat Perikanan sebesar Rp 32.167.500,00; Bahan Material (APBN) sebesar Rp 1.222.500,00; Beban Barang Jasa BLUD sebesar Rp 3.682.928.954,18; Batu Ciping sebesar Rp 90.000,00; Kertas Berharga sebesar Rp 55.585.000,00; dan Blanko & Buku Register Capil sebesar Rp 439.594.980,00.
- c. Barang yang diserahkan ke masyarakat berupa Alat Kontrasepsi KB sebesar Rp 16.938.620,00

Akuntansi Aset Tetap BPKD Kabupaten Luwu

Aset Tetap BPKD Kabupaten Luwu terdiri atas Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset tetap lainnya; dan Kontruksi dalam pengerjaan. Seperti yang dijelaskan pada PSAP BA No. 7 Paragraf 7 PP No. 71 Tahun2010, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. klasifikasi aset tetap adalah tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan kontruksi dalam pengerjaan. Maka dapat disimpulkan bahwa klasifikasi aset tetap BPKD sudah sesuai dengan PSAP BA No. 7 PP No. 71 Tahun 2010

Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya. (sumber : CALK BPKD Kabupaten Luwu)

Tabel 4.11
Rincian Aset Tetap
(dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	2	3	4
1	Tanah	405.755.027.640,00	400.576.134.240,00
2	Peralatan dan Mesin	383.986.760.730,52	340.062.601.339,13
3	Gedung dan Bangunan	715.286.124.498,84	657.911.372.388,39
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.117.954.658.281,76	1.025.948.372.911,80
5	Aset Tetap Lainnya	70.983.655.954,20	61.343.154.003,20
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	40.000.124.119,75	4.737.007.010,00
Jumlah Aset Tetap		2.733.966.351.225,07	2.490.578.641.892,52
Akumulasi Penyusutan 2018		(736.478.969.302,97)	(558.999.923.790,06)
Nilai Buku Aset Tetap		1.997.487.381.922,10	1.931.578.718.102,46

Di dalam penyajian aset tetap pada laporan posisi keuangan, BPKD Kabupaten Luwu menyajikannya secara terpisah seperti: Bangunan, Tanah, Mesin, Kendaraan, dan Inventaris Kantor. Juga, BPKD Kabupaten Luwu menyajikan aset tetap dalam neraca sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutannya. Untuk metode penyusutannya, BPKD Kabupaten Luwu menggunakan metode garis lurus (straight line method).

Setiap aset tetap dalam BPKD Kabupaten Luwu, harga perolehannya dapat dilihat dalam daftar aset tetap, begitu juga dengan akumulasi penyusutan, kita bisa mengetahui saldo dari akumulasi penyusutan pada akhir tahun atau periode dalam daftar aset tetap.

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), BPKDKabupaten Luwu telah mengungkapkan hal-hal menyangkut aset tetap sesuai dengan PSAP BA No. 7 Paragraf 80 PP No. 71 Tahun 2010 sebagai berikut: (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengakuan dan penilaian aset tetap; dan (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan, pelepasan, dan akumulasi penyusutan. Dalam hal pengungkapan mengenai penyusutan, BPKD Kabupaten Luwu tidak mencantumkan masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Namun hanya mencantumkan metode penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan awal dan akhir priode.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil peneltian yang dilakukan terhadap Penerapan Akuntansi Persediaan dan Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akuntansi persediaan BPKD Kabupaten Luwu sebagian besar telah sesuai dengan standar yang berlaku, dengan berdasarkan pada indikator pengukuran sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi persediaan pada BPKD Kabupaten Luwu telah sesuai dengan PSAP BA No. 05 PP No. 71 Tahun 2010;
 - b. Pengukuran persediaan dan beban persediaan BPKD Kabupaten Luwutelah sesuai dengan PSAP BA No. 05 PP No. 71 Tahun 2010; dan
 - c. Pengungkapan persediaan BPKD Kabupaten Luwu telah sesuai dengan PSAP BA No. 05 PP No. 71 Tahun 2010
2. Akuntansi aset tetap BPKD Kabupaten Luwu sebagian besar telah sesuai dengan standar yang berlaku, dengan berdasarkan pada indikator pengukuran sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi Aset Tetap pada BPKD Kabupaten Luwu telah sesuaidengan PSAP BA No. 05 PP No. 71 Tahun 2010;
 - b. Pengukuran aset tetap BKD Kabupaten Luwu telah sesuai dengan PSAP BA 07 PP No. 71 Tahun 2010;
 - c. Pengungkapan informasi aset tetap pada Catatan Atas Laporan Keuangan BKD Kabupaten Luwu belum lengkap. Dalam hal ini BKD Kabupaten Luwu tidak mencantumkan masa manfaat aset tetap dan tarif penyusutan aset tetap.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka saran yang dapat diberikan kepada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Luwu antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam hal pengungkapan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Luwu harus mengungkapkan informasi tentang pos-pos laporan keuangan secara lengkap. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b. Dalam hal pemberian data atau informasi kepada peneliti berupa laporan keuangan BPKD harus lebih transparansi dan lengkap. Hal tersebut bertujuan untuk lebih mempermudah pengguna informasi untuk mendapatkan data yang diperlukan dan dapat lebih mempercepat penyelesaian dalam kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.

Abdul Halim dkk, 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Bastian, Indra.2010.Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga.PenerbitErlangga :Jakarta

Erlina, dkk. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Jakarta:Salemba Empat.

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Harahap, Sofyan Syafri. 2011. Teori Akuntansi. Jakarta: Rajawali Pers Nordiawan, Deddi, dkk. 2009. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat

Rudianto. 2012. Pengantar Akuntansi “Konsep & Tehnik Penyusunan LK. Jakarta: Erlangga.

Samryn, L. M. 2014. Pengantar Akuntansi. Edisi IFRS. Jakarta: Rajawali Press

- Samryn. 2015. Pengantar Akuntansi “Metode Akuntansi untuk Elemen Laporan Keuangan”. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soemarso. 2010. Akuntansi Suatu Pengantar. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Tanjung, Abdul. 2013. Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Cetakan Kedua. Alfabeta. Bandung.
- Andriyani, Lysa. 2008. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Daerah dalam Penyusunan Neraca pada Pemerintahan Kabupaten Jember (Studi Kasus pada Kantor Pemerintah Kabupaten Jember). Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Auliana. 2014. Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Pinang Berdasar Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Astria, Iis. 2017. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada RSUD DR. Soeratno Gemolong Sragen. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Irawati, Ria. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Dan Akuntansi Aset Tetap Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah). Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.
- Kayati. 2016. Pengaruh Faktor Keperlakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Skripsi. Semarang, Universitas Negeri Semarang.
- Kurniawati, Risca. 2013. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kementerian Pekerjaan Umum. Jurnal Media Wahana Ekonomika Universitas PGRI Palembang.
- Kusuma, Ririz Setiawati. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.
- Langelo, F., Saerang, D.P.E., Alexander, S.W. 2015. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Bitung. Jurnal EMBA Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Niu, Karamoy, dan Tangkuman. 2014. Analisis Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kotamobagu. Jurnal EMBA Universitas Negeri Gorontalo.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pernyataan Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan dan Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Putra, Gde Yogiswara DarmaI Wayan dan Dodik. 2015. E-Jurnal Akuntansi Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI. ISSN: 2302-8556.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Septiana, Tri. 2011. Analisis Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005). Skripsi. Padang: Universitas Andalas.